

PEMANFAATAN BANTUAN PKH BAGI MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN DI DESA SIDOREJO KABUPATEN SIDOARJO

Rr. Diana Febrianti

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
diana.17040564056@mhs.unesa.ac.id

Diyah Utami

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
diyahutami@unesa.ac.id

Abstrak

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan secara ekonomi guna mencukupi kebutuhan standar harian hidup rata-rata masyarakat pada suatu daerah. Kondisi kemiskinan ini ditandai dengan rendahnya pendapatan harian yang diterima guna dialokasikan kepada kebutuhan pokok sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keluarga miskin penerima bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH dalam pemanfaatan bantuan tersebut di Desa Sidorejo Kabupaten Sidoarjo. Memaparkan terkait alokasi dana bantuan, ketergantungan penerima bantuan terhadap bantuan yang diberikan serta memaparkan mengenai fungsi nyata dan fungsi yang tidak diantisipasi dalam pemanfaatan bantuan Program Keluarga Harapan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif dengan pendekatan *participant observation* yakni peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang dilakukan subjek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan telah didistribusikan kepada keluarga pra-sejahtera, Namun dalam aspek pemanfaatan, kurangnya edukasi membuat permasalahan muncul seperti penggunaan dana bantuan yang tidak semestinya dan juga banyaknya pihak yang berusaha memperoleh keuntungan sepihak. Hal tersebut merupakan fungsi laten yang didapati dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Pemanfaatan, Program Keluarga Harapan, Fungsi

Abstract

Poverty is a condition of economic inability to meet the needs of the daily standard of living of the average community in an area. This condition of poverty is characterized by low daily income received to be allocated to basic daily needs. This study aims to identify poor families who are recipients of the Program Keluarga Harapan or PKH assistance in utilizing the assistance in Sidorejo Village, Sidoarjo Regency. Describe the allocation of aid funds, the dependence of beneficiaries on the assistance provided and explain the real and unanticipated functions in the utilization of the Program Keluarga Harapan assistance. The method used in this research is qualitative with a participant observation approach, namely the researcher is involved in the daily activities of the subject. The results showed that the aid had been distributed to underprivileged families. However, in terms of utilization, the lack of education caused problems to arise such as improper use of aid funds and also many parties trying to obtain unilateral benefits. This is a latent function found in this study.

Keywords: Utilization, Program Keluarga Harapan, Function

Pendahuluan

Kemampuan guna mencukupi ekonomi yang rendah akan berdampak pada aspek kehidupan lainnya seperti pendidikan dan juga kesehatan (Putri Anita Rahman, Firman 2019). Kemiskinan pada negara berkembang dianggap dalam permasalahan pembangunan yang tidak merata sehingga melebarnya kesenjangan sosial yang ada dalam suatu negara dan juga berpengaruh pada kesenjangan pendapatan antar daerah. Kemiskinan juga merupakan salah satu permasalahan besar yang dihadapi di Indonesia menurut data statistik terkait tingkat kemiskinan jumlah penduduk miskin pada bulan maret 2020 sebanyak 26,42juta orang meningkat sebanyak 1,63 juta orang dari data terakhir September 2019. Persentase penduduk miskin ini mencakup 9,78 persen atau meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 (Badan Pusat Statistik 2019). Utamanya saat pandemi covid-19 menyebabkan meningkatkan angka kemiskinan. Banyaknya sektor ekonomi yang terdampak dan juga banyak perusahaan yang merumahkan karyawan. Merespon dari meningkatnya angka kemiskinan yang tinggi utamanya saat pandemi ini pemerintah memberikan berbagai bantuan yang diberikan secara tunai maupun non tunai. Berbagai usaha dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.

Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian pemerintah dalam bentuk bantuan sosial (bansos) bersyarat kepada keluarga pra-sejahtera dan rentan yang mana terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (Kementerian Sosial 2020). Program Keluarga Harapan ini sendiri

memiliki beberapa tujuan utamanya dalam membuka akses keluarga penerima manfaat atau KPM bagi ibu hamil dan balita dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan dan juga fasilitas lainnya seperti pendidikan. Dalam berkembangnya Program Keluarga Harapan ini juga diharapkan menysasar pada penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Program keluarga harapan atau PKH ini sendiri memiliki tujuan guna meningkatkan taraf hidup keluarga penerima bantuan melalui akses kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Selain itu juga bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga yang pra sejahtera atau dapat dikatakan bahwa nominal penghasilan dibawah angka kebutuhan harian dan juga guna mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada.

Dalam analisis teori Meton, fungsi dikatakan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang diamati dan dibuat untuk adaptasi dalam penyesuaian sistem tertentu. Merton juga mengembangkan idenya terkait konsepsi disfungsi, alternatif fungsional, dan konsekuensi keseimbangan fungsional atau *net balance* serta fungsi manifest dan laten (Merton: 1949). Setiap struktur yang memiliki tujuan dapat melahirkan fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest merupakan fungsi nyata atau dapat dikatakan merupakan fungsi yang diantisipasi seperti dalam Program Keluarga Harapan memiliki fungsi manifest yakni meningkatkan Pendidikan, Kesehatan dan juga kesejahteraan sosial untuk lansia dan juga disabilitas fungsi ini merupakan perwujudan dalam tujuan program keluarga harapan.

Hasil penelitian milik Pradipta Ajeng mengungkapkan mengenai gaya hidup konsumtif penerima bantuan PKH atau program keluarga harapan dalam jurnal tersebut juga ditemui banyaknya penerima bantuan mengalokasikan dana program keluarga harapan guna memberi barang mewah seperti cincin emas, dan berbagai benda mewah lainnya seperti elektronik dll. Dalam jurnal tersebut bermakna bahwa program keluarga harapan memiliki fungsi yang tidak diantisipasi atau yang dikenal sebagai fungsi laten.

Observasi awal yang peneliti temui menunjukkan terkait adanya banyak konsekuensi-konsekuensi tak terduga dari penerimaan bantuan yang diberikan secara rutin tiap bulan dan sudah berjalan bertahun-tahun. Penerima PKH juga diketahui menerima banyak bantuan lainnya seperti KIS, KIP dan juga BPNT atau Bantuan pangan non tunai yang diberikan secara rutin. Banyaknya masyarakat penerima bantuan yang bersandar pada bantuan yang diberikan membuat hakikat bantuan yang seharusnya membantu menjadi memanjakan penerimanya.

Artikel ini membahas mengenai pengalokasian dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk keluarga penerima manfaat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Bagaimana masyarakat desa Sidorejo utamanya penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memanfaatkan program tersebut dan Bagaimana fungsi laten, manifest, dan konsekuensi-konsekuensi tidak disengaja dalam pemanfaatan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sidorejo, Kecamatan Krian. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yakni mengidentifikasi keluarga miskin penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Sidorejo, selain

itu guna menelaah terkait pemanfaatan dana Program Keluarga Harapan atau PKH bagi masyarakat penerima manfaat dan faktor apa saja yang mempengaruhi pemanfaatan bantuan serta mengidentifikasi terkait ketergantungan bantuan PKH bagi masyarakat penerima-nya, Kemudian mengidentifikasi terkait fungsi laten dan manifest yang merupakan konsekuensi dari penerimaan bantuan PKH.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *participant observation* yakni menitikberatkan peneliti kepada kepesertaannya dalam kehidupan dari subjek penelitian tersebut. Karena pada dasarnya Merton menekankan pada perbedaan antara motif dan konsekuensi objektif yang dinyatakan dalam perbedaan manifest dan laten. Menurut (Sugiyono 2011) data merupakan hal yang penting untuk dapat memecahkan suatu permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan juga dukungan dokumentasi.

Jenis pendekatan dalam pembuatan penelitian ini yakni pendekatan kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif adalah dengan menggunakan jenis pendekatan tersebut dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, pemikiran dari individu maupun kelompok yang diperoleh dari data observasi, wawancara, dan dokumentasi (Effendi 1987). Metode kualitatif dapat mendapatkan data mendalam diberbagai kasus dan individu (Creswell 2016).

Melalui jenis pendekatan yang dipaparkan diatas dalam penelitian ini berguna untuk bisa memperoleh informasi terkait pemanfaatan bantuan PKH yang

diterima oleh pemilik kartu manfaat di Desa Sidorejo Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian dilakukan di Desa Sidorejo dengan subjek penelitian yakni keluarga penerima bantuan PKH dengan kualifikasi telah memiliki keanggotaan PKH lebih dari 3 tahun. Selain keluarga penerima bantuan, dalam penelitian ini juga memilih pendamping PKH dan juga pengurus PKH sebagai subjek dalam penelitian untuk mendukung peneliti memperoleh data mendalam.

Kajian Pustaka

a. Kemiskinan

Kemiskinan ditinjau dalam prespektif sosiologi merupakan permasalahan pembangunan yang multiparameter yang mana dapat diukur dengan berbagai cara uang ada baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Aspek pengukuran kemiskinan dari aspek kuantitatif yakni seperti mengukur kemampuan individu, keluarga dan rumah tangga dalam memenuhi beberapa kebutuhan pokoknya baik dalam perhitungan penghasilan perbulan, satuan kecukupan pengeluaran bahan pokok. Sedangkan perhitungan secara kualitatif yakni seperti mendeskripsikan realitas kemiskinan secara naratif dengan visualisasi data yang baik berupa foto, video, maupun rekaman yang biasanya digunakan oleh peneliti konvensional (Siahaan 2011).

Menurut (Chambers 2006), kemiskinan merupakan suatu konsep yang memiliki lima dimensi yaitu kemiskinan yakni kondisi dimana kepemilikan pendapatan rendah, kemudian dimensi kedua yakni ketidakberdayaan dimana seseorang yang miskin memiliki kekuatan sosial yang rendah pula seperti ketidakadilan dan kurangnya persamaan hak untuk mendapatkan hidup layak,

kemudian dimensi ketiga yakni rentan dalam kondisi atau situasi darurat kelompok masyarakat miskin sering kali tidak siap jika dihadapkan dalam keadaan tak terduga yang mana membutuhkan alokasi tabungan seperti bencana alam dan biaya pengobatan rumah sakit, kemudian dimensi keempat yakni ketergantungan pada pihak lain yang tinggi. Kemudian dimensi kelima yakni keterasingan dalam konsep ini yang dimaksud adalah tempat tinggal yang cenderung jauh dari pusat kota dan minim akses dalam segala hal.

Konsep kemiskinan dalam penelitian ini menjadi urgensi tersendiri karena subjek dalam penelitian ini yakni masyarakat dengan ekonomi rendah yang menerima bantuan PKH dari Pemerintah. Konsep kemiskinan juga diharapkan memudahkan peneliti dalam menganalisis terkait pemanfaatan bantuan yang dilakukan oleh penerima bantuan tersebut.

b. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH atau Program keluarga harapan merupakan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau (DTKS) dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM. Diluncurkan awal pada tahun 2007 yang mana memiliki tujuan guna membuka akses pemilik kartu manfaat guna dapat menerima akses pendidikan, kesehatan dan juga kesejahteraan sosial.

Program Keluarga Harapan memiliki tujuan guna meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses yang terkadang sulit didapat oleh masyarakat miskin yakni aspek kesehatan dan juga pendidikan, selain itu PKH juga bertujuan membantu kebutuhan pokok dalam hal ini yakni pemberian bantuan bahan pokok sehingga beban pengeluaran dapat dikontrol, selain itu tujuan awal dari adanya PKH sendiri yakni mengurangi

angka kemiskinan dan mengurangi tingkat kesenjangan sosial yang ada di Indonesia.

Kriteria keluarga penerima bantuan Program Keluarga Harapan yakni harus memiliki satu diantara tiga komponen berikut, yakni:

1. Aspek kesehatan yakni dalam satu rumah terdapat ibu hamil atau anak dengan usia 0-6 tahun
2. Aspek pendidikan yakni memiliki anak sekolah minimal SD/Sederajat hingga anak SMA/Sederajat.
3. Aspek kesejahteraan sosial yakni dalam keluarga tersebut terdapat penyandang disabilitas berat atau penduduk usia lanjut yakni 75 tahun keatas.

Selain komponen diatas Program Keluarga Harapan juga memiliki beberapa kewajiban dan hak yang diperoleh oleh setiap pemilik kartu manfaat. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan yakni antara lain penerima bantuan wajib memeriksakan kesehatan secara rutin menggunakan KIS, Presensi hadir anak sekolah juga harus melebihi 85%, dan juga keluarga dengan penduduk usia lanjut dan disabilitas wajib mengikuti penyuluhan yang dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain kewajiban tersebut pemilik kartu manfaat juga diwajibkan datang dalam pertemuan rutin bulanan yang diadakan secara bergilir dari rumah kerumah antar penerima bantuan. Pertemuan ini sering disebut dengan *P2K2/ Family Development Session* yang mana memiliki beberapa tujuan dalam diadakannya pertemuan ini: yakni sebagai peningkatan pengetahuan terkait bagaimana mendorong anak dalam bersemangat sekolah dan terkait pendidikan dan pola pengasuhan anak. Selain itu juga meningkatkan pengetahuan terkait

pengelolaan keuangan keluarga guna mengantisipasi adanya permasalahan keuangan dengan memberikan anjuran terkait pengalokasian uang guna kebutuhan pokok dan kebutuhan tersier, selain keuangan dan pendidikan tujuan dari pertemuan ini juga guna kesadaran terkait kesehatan yang mana dengan pemilikan kartu tersebut dapat memberikan fasilitas kesehatan gratis yang dapat dimanfaatkan di pusat kesehatan setempat pada desa atau kelurahan yang ada. Pertemuan juga dimanfaatkan dalam pengarahan kesejahteraan penduduk lanjut usia dan disabilitas yang mana guna dapat menjadi patokan dalam pendampingan penduduk lansia dan disabilitas selain itu juga sebagai pengingat terkait kewajiban dan hak yang ada dalam lingkungan sosial sekaligus dalam memanfaatkan kartu keluarga harapan. Pemanfaatan bantuan PKH telah diatur oleh Kementerian Sosial dalam Pedoman Pelaksanaan PKH tahun 2020, didalamnya tertuliskan jelas terkait arah penggunaan bantuan PKH yang semestinya. Sedangkan hak dari KPM PKH yakni menerima bantuan sosial, mendapatkan pendampingan sosial, mendapat pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta mendapat bantuan komplementer dibidang pangan, listrik dan bantuan lainnya.

C. Analisis Struktural Fungsional Robert K. Merton

Dalam pembangunan teorinya, Merton tertarik terhadap keadaan struktur dan juga fungsi sosial. Merton menganggap bahwa struktur dan system sosial seperti organisme kehidupan sehingga teori yang dihasilkannya disebut sebagai structural fungsional. Besar dan berkembang pada saat Amerika dikuasai oleh 2 sosiolog yang bersebrangan yakni Paul Lazarfred yang

sangat teguh pada sosiologi empiris dan juga Talcott Parsons dengan teoritisnya.

Merton memilih mengembangkan analisis teori pada ranah *middle range theories* dengan beberapa pengaruh sosiologi yang utama seperti Durkheim dan juga Webber melalui teori birokrasinya dan itu merupakan bekal Merton dalam pengembangan penelitiannya (Wirawan 2013)

Teori fungsionalisme struktural pada dasarnya merupakan teori dengan penekanan pada keteraturan yang ada dalam masyarakat dan mengesampingkan konflik yang ada dan juga perubahan dalam masyarakat. Masyarakat dalam teori ini merupakan jaringan yang terorganisasi dalam keteraturan dan dibawah nilai nilai yang ada. Segala system dan struktur yang ada merupakan fungsional bagi penganut teori ini.

Analisis fungsional menurut Merton menjelaskan terkait fokusnya pada kelompok, organisasi, masyarakat dan juga kebudayaan. Merton menyatakan terkait objek yang mana dibawah kuasa analisis fungsional struktural maka memiliki penggambaran yang distandarkan terkait terpola dan berulang (Merton 2014). Menurut merton analisis fungsional awal memecah belah motif subjektif individu dengan fokus hanya pada fungsi-fungsi struktur dan lembaga sosial, Merton menyatakan bahwa fungsi didefinisikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang diamati dan dibuat untuk adaptasi dalam penyesuaian system tertentu (Merton 2014).

Merton juga memberikan konsep analisisnya terkait fungsi laten atau manifest . Fungsi manifest memiliki pengertian yakni fungsi-fungsi yang dapat diantisipasi yang secara sengaja dibuat guna tujuan tertentu. Sedangkan fungsi

laten yakni fungsi-fungsi yang tidak diantisipasi oleh system sosial. Dalam hal ini kedua fungsi laten dan manifest dapat berdampak positif/ fungsional namun juga dapat menjadikan fungsi tersebut hal yang buruk bagi system ketika fungsi tersebut berjalan disfungsional (Jones et al. 2016)

Keterkaitannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini yakni dalam fokus penelitian dalam penelitian ini mengkaji terkait fungsi bantuan program keluarga harapan pada masyarakat desa sidorejo. Banyaknya pemberian program dalam kondisi pandemi ini menyisakan begitu banyak manfaat bagi masyarakat utamanya penerima bantuan. Dimana fungsi dari tujuan awal program memberikan konsekuensi-konsekuensi pada berjalannya program tersebut yang diamati dan juga digunakan sebagai adaptasi. Dalam hal ini pemanfaatan bantuan terdapat 2 aspek yakni pemanfaatan bantuan yang diharapkan seperti tujuan awal program tersebut ada dan dibentuk atau dapat dikatakan sebagai Fungsi manifest dan juga terdapat pemanfaatan bantuan yang dalam kaitannya tidak diduga munculnya atau tidak diantisipasi oleh system terkait atau dikenal sebagai Fungsi Laten.

Dalam hal ini peneliti berharap dengan penggunaan teori struktural fungsional dari Robert King Merton dapat membedah pemanfaatan Program Keluarga Harapan atau PKH terkait pemanfaatan sesuai dengan aturan dan pemanfaatan real dilapangan. Menelaah terkait fungsi-fungsi nyata yang didapati dan konsekuensi yang tidak terantisipasi dari pemberian bantuan secara rutin bulanan karena PKH disalurkan setiap bulan. Dengan memusatkan pada interaksi masyarakat melalui P2K2 dan berbagai pertemuan lainnya dalam alur pelaksanaan PKH.

Pembahasan

a. Mengidentifikasi keluarga miskin penerima bantuan PKH di Desa Sidorejo

Kemiskinan merupakan keadaan atau kondisi dimana dihadapi oleh seseorang/keluarga/ anggota masyarakat yang mana tidak memiliki kekuatan atau kemampuan guna memenuhi standar kebutuhan hidup harian sebagaimana masyarakat lain lakukan (Amalia 2015). Dalam penelitian ini peneliti memilih 6 subjek, 4 diantaranya merupakan penerima PKH yang sudah menjadi penerima bantuan lebih dari 3 tahun, sedangkan dua diantaranya yakni pengurus serta pendamping PKH di Desa.

Penerima Program Keluarga Harapan merupakan dari keluarga pra-sejahtera atau keluarga dengan tingkat ekonomi yang rendah. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan PKH milik Kementerian Sosial, Kriteria penerima PKH terdiri dari tiga komponen yaitu:

1. Komponen kesehatan yakni terdiri atas ibu hamil dan anak usia 0 hingga 6 tahun
2. Komponen pendidikan yaitu terdiri atas anak Sekolah Dasar/ sederajat yang berusia lebih dari 6 tahun, anak Sekolah Menengah Pertama yang berusia lebih dari 12 tahun dan anak Sekolah Menengah Akhir yang berusia lebih dari 15 tahun.
3. Komponen kesejahteraan sosial yakni memiliki anggota keluarga lanjut usia dan penyandang disabilitas berat. Per tahun 2020 penerima bantuan lanjut usia ketika berusia lebih dari 70 tahun

Di Desa Sidorejo sendiri penerima bantuan PKH mencapai 127 keluarga penerima bantuan dengan rincian sbg berikut yang dikategorisasikan berdasarkan penerima tiap dusun

Jumlah Penerima PKH di Desa Sidorejo

Dusun	Penerima Bantuan PKH
Bendo Mungal	9
Dukuh Bareng	7
Sidorame	15
Sidorejo	16
Semampir	18
Madubronto	37
Sidorenggo	20
TOTAL	127

Sumber: Arsip Desa Sidorejo

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh 5 subjek penelitian yakni 3 penerima bantuan dan 2 pengurus bantuan Program Keluarga Harapan didapati bahwa penerima awalnya mengacu pada DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial milik Kementerian Sosial. Data ini merupakan data penduduk pra-sejahtera dengan kemampuan ekonomi yang kurang. Sebelum adanya PKH, banyak bantuan yang diluncurkan seperti BLT dan banyak bantuan lainnya. Sasaran program bantuan ini hingga tepat kepada penerimanya mengacu pada DTKS.

Seiring berkembangnya program bantuan yang ada, pemerintah tidak menutup akses bagi keluarga yang bukan tercantum dari DTKS (Ramadhani & Mulyana 2020). Pemerintah memfasilitasi tiap desa untuk mengusulkan data baru guna menjadi tambahan dalam DTKS, sehingga desa disini juga dapat mengusulkan pegajian penerima anggota bantuan baru.

Menurut konsep kemiskinan milik (Chambers 2006), kondisi ketika seseorang memiliki pendapatan rendah akan berakibat pada banyak hal dikehidupannya, salah satunya yakni tidak memilikinya keberdayaan sosial. Dalam penelitian ini peneliti mengidentifikasi subjek penerima PKH melalui lamanya menerima bantuan

dan pekerjaan sehari-hari dari penerima bantuan tersebut. Berikut penjelasannya dalam sebuah tabel;

Pekerjaan Subjek Penelitian

Nama	Usia	Jenis Pekerjaan	Lama Kepemilikan PKH
Keluarga Ibu Sulkah	56 Tahun	Kuli Bangunan	4 Tahun
Keluarga Ibu Susi	41 Tahun	Pegawai Catering	3 Tahun
Keluarga Ibu Robiah	49 Tahun	Tukang Odong-odong keliling	5 Tahun
Keluarga Ibu Anna	43 Tahun	Penjual Jus	3 Tahun

Sumber: Data hasil wawancara

Berdasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang diterbitkan oleh Kementerian sosial, (Kementerian Sosial 2020) setiap keluarga penerima bantuan memiliki hak dan kewajiban sebagai pemilik kartu manfaat yang mana hak dan kewajiban tersebut seyogyanya diamalkan sesuai dengan pedoman yang ada dan berlaku.

Melansir laman pkh.kemensos.go.id jumlah bantuan sosial Program Keluarga Harapan pada tahun 2021 dibagi dalam kategori yang berbeda dengan nominal; bantuan yang berbeda pula, berikut rinciannya sebagai berikut dengan kategori yang dibedakan atas tiap komponen yang berbeda:

Nominal Bantuan PKH

Kategori ibu hamil/nifas	Rp 3.000.000/Tahun
Kategori Anak usia dini	Rp 3.000.000/Tahun
Kategori Pendidikan SD	Rp 900.000/Tahun
Kategori Pendidikan SMP	Rp 1.500.000/Tahun
Kategori Pendidikan SMA	Rp 2.000.000/Tahun

Kategori Penyandang Disabilitas	Rp 2.400.000/Tahun
Kategori Lanjut Usia	Rp 2.400.000/Tahun

Sumber : Data hasil wawancara

Menganut pada pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan, Pemanfaatan dana bantuan sosial dapat digunakan untuk beberapa aspek guna mendukung kesejahteraan perekonomian keluarga. Berikut kategorisasi pemanfaatan dana bantuan sesuai anjuran pemerintah

a. Program Keluarga Harapan (PKH)

Disalurkan 4 tahap pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober melalui BNI, BTN dan Mandiri. Pemerintah mewajibkan dana bantuan dialokasikan kepada:

1. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. guna sebagai transportasi layanan kesehatan, pembelian makanan bergizi, kebutuhan perlengkapan kesehatan.
2. Peningkatan pendidikan anak. Seperti pengalokasian dana bantuan untuk transportasi anak sekolah, pendidikan dan biaya ekstrakurikuler, kebutuhan peralatan sekolah.
3. Mengurangi beban keluarga dan meningkatkan pendapatan dalam hal ini penerima PKH diharapkan mengalokasikan dana bantuan pada kebutuhan keluarga, ditabung dan juga modal usaha guna sebagai tambahan pendapatan

b. Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)

Program ini merupakan program bantuan rutin bulanan senilai Rp 200.000/bulan yang disalurkan melalui agen yang ditunjuk. Program bantuan ini

diharapkan dialokasikan pada bahan pangan dengan jumlah gizi karbohidrat, protein hewani, protein nabati dan sumber vitamin/mineral.

c. Program Bansos Tunai (BST)

Program ini disalurkan melalui POS Indonesia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dimasa pandemi seperti kebutuhan sembako dan juga keperluan lainnya dimasa pandemic saat ini.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari subjek Pak Angga selaku pengurus Program Keluarga Harapan, beliau mengatakan bahwa di Desa Sidorejo sendiri telah menyepakati bahwa kewajiban setiap penerima bantuan jika bantuan sudah diterima baik bantuan pangan maupun uang tunai wajib untuk melapor kepada pendamping PKH masing-masing atau absen digrup Whatsapp. Tujuan adanya kewajiban tambahan ini guna dapat mengevaluasi siapa saja pihak yang tidak mengambil bantuan guna *crosscheck* permasalahan apa yang didapati sehingga bantuan tak terambil.

Menurut informasi dari ke-4 penerima bantuan PKH mereka menggunakan dana bantuan untuk menyokong kebutuhan harian, berdasarkan Informasi dari Ibu Sulkah beliau gunakan untuk tambahan keperluan anak sekolah dan juga untuk membayar hutang seperti adanya tagihan Mekaar (Program Pinjaman dari PNM untuk UMKM) setiap minggu.

Berdasarkan penjelasan dari pedoman kementerian sosial sudah jelas bahwa pemanfaatan dana bantuan guna menyokong ekonomi keluarga melalui aspek pendidikan, kesehatan dan juga kesejahteraan sosial. Namun, pada realitanya dan peneliti temui disubjek dalam penelitian ini masih banyaknya penerima bantuan yang kurang cermat

dalam mengelola dana bantuan yang ada. Berdasarkan penjelasan subjek banyak subjek yang menggunakan dana bantuan diperuntukan membayar hutang, membeli kebutuhan seperti rokok dan juga kebutuhan tersier seperti baju, sepatu dll. Tak sedikit juga peneliti temui dalam penelitian ini, pengalokasian dana bantuan guna membeli barang elektronik seperti TV ataupun Hp. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan amanah pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang dianjurkan oleh Kementerian Sosial.

C. Permasalahan dalam pemanfaatan dana PKH

Dalam pelaksanaan suatu program berkelanjutan pasti memiliki kendala dan permasalahan yang beragam begitu juga yang terjadi dalam program keluarga harapan yang berupaya guna mengentaskan kemiskinan. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pemberian bantuan yakni pengalokasian dana yang tidak sesuai dengan amanah yang berlaku. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Program Keluarga Harapan merupakan perkembangan dari sistem perlindungan sosial yang meringankan dan membantu keluarga miskin dalam akses kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sehingga pengalokasian dana bantuan harus dalam ranah tersebut.

Pada subjek yang peneliti temui terdapat beberapa jawaban mengejutkan terkait pengalokasian dana PKH, Banyak yang menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan tersier seperti pembelian sepatu, baju dan juga pembayaran hutang yang semestinya hal tersebut menyalahi dari aturan pengalokasian dana bantuan. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Angga selaku

pengurus yang berkali-kali menegur penerima PKH yang menggunakan dana bantuan untuk membeli rokok suami dan berbagai kebutuhan lainnya seperti elektronik dan perhiasan. Penyalahgunaan ini akan terus ada dan terjadi jika kurang adanya penegasan dari pihak pemberi bantuan. Pelaporan rutin juga tidak diberlakukan oleh petugas pendamping program sehingga masyarakat penerima lebih leluasa dalam memanfaatkan dana bantuan tersebut. Deskripsi subjek terhadap pemanfaatan PKH oleh Ibu Sulkah yakni Digunakan untuk membelikan anak sepatu baru, tas baru dan juga tambahan untuk belanja dipasar, terkadang juga digunakan untuk bayar iuran PKK desa. Kemudian penjelasan ibu Robiah yakni Digunakan untuk keperluan dapur, membayar hutang dan juga terkadang mengajak anak ke Ramayana. Selanjutnya penjelasan Ibu Susi untuk tambahan beli buku anak dan juga tambahan uang makan, serta membayar cicilan di tetangga. Kemudian yang terakhir penjelasan ibu Anna yakni untuk keperluan tambahan dapur serta juga membayar cicilan hutang mingguan.

D. Faktor yang mempengaruhi pemanfaatan dana PKH

Fungsi merupakan konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati yang menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dalam suatu sistem. Fungsionalis struktural melihat ini sebagai aktivitas yang selalu terpola dan berulang (Ritzer 2012)

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemanfaatan bantuan Program Keluarga Harapan, antara lain yakni factor pertama karena kurang tegasnya pengawasan yang ada baik dari pendamping PKH maupun Ketua PKH. Dilansir dari kemensos.go.id pendamping PKH merupakan fasilitator, mediator dan juga advocator. Pada pelaksanaannya

pendamping PKH merupakan pemberi materi saat sosialisasi PKH baik pada tingkat kecamatan maupun desa, selain itu pendamping PKH juga merupakan validator bagi calon penerima bantuan baru. Pendamping PKH memiliki peran penting dalam mengawasi penerima bantuan baik dalam penggunaan bantuan maupun kendala yang dihadapi, pendamping PKH memiliki peran penting karena berhubungan langsung dengan penerima bantuan. Dalam setiap pemberiannya informasi yang ada dan update baru terkait program bantuan, sebagai pendamping PKH memiliki tugas untuk menyampaikan. Namun pada pelaksanaannya pendamping PKH kurang mengawasi dalam setiap pemanfaatan bantuan. Terlihat dari tidak adanya pelaporan wajib yang diberlakukan setiap setelah pencairan bantuan yang memberikan akses atau ruang lebih kepada penerima bantuan untuk mengalokasikan sesuai keinginan masing-masing tanpa adanya pertanggungjawaban.

Faktor kedua yakni penerima bantuan yang kurang aktif dalam menghadiri pertemuan rutin bulanan. Berdasarkan penjelasan subjek terdapat beberapa yang tidak memiliki smartphone android sehingga dalam mengakses informasi pun kurang. Terlebih dalam situasi pandemic seperti saat ini yang mana pertemuan ditiadakan selama satu tahun lebih sehingga kurangnya kegiatan sosialisasi yang ada antar anggota. Tujuan adanya pertemuan rutin bulanan yakni sesuai dengan namanya terkait Peningkatan Kemampuan Keluarga sehingga banyak arahan yang diberikan dalam kegiatan tersebut. Materi kegiatan juga terkait mekanisme pelaksanaan PKH baik dalam penerimaan bantuan hingga pemanfaatan bantuan.

Faktor ketiga yakni pada aspek penerima yang tidak tepat sasaran.

Berdasarkan penjelasan Subjek Pak Angga selaku pengurus PKH memang banyak didapati penerima bantuan yang sudah dalam kategori tidak layak untuk menerima bantuan karena dilihat dari struktur rumah dan juga kepemilikan kendaraan bermotor. Dari adanya kegiatan labelisasi yang dilakukan Dinas Sosial berkerjasama dengan desa membuat 9 keluarga mundur karena keberatan jika rumahnya diberi label penerima bantuan keluarga miskin, dari situ terlihat bahwa memang selama ini banyak penerima bantuan yang sudah mampu dalam perekonomian namun enggan untuk melepas bantuan tersebut. Pak Angga dan Pak Agus selaku Lurah Desa Sidorejo mengharapkan lebih dari 20 keluarga mundur dari penerimaan bantuan karena dianggap mampu namun per tanggal 6 April 2021 masih 9 keluarga yang mundur. Desa menggalakan bantuan benar-benar menysar pada warga miskin yang ada bukan kepada warga yang mengaku miskin sehingga diberlakukan koor tiap Rukun Tetangga agar saling mengontrol dan memberi masukan kepada desa dan penerimanya terkait bantuan yang ada.

E. Ketergantungan penerima bantuan PKH di Desa Sidorejo

Pandemi covid-19 yang sulit ditebak kapan berakhir membuat pemerintah memberikan banyak memberikan kucuran dana bantuan sosial. Utamanya pada masyarakat yang tercantum pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) milik kementerian sosial yang menerima bantuan PKH, pada saat pandemi ini juga mendapat banyak bantuan tambahan. Di Desa Sidorejo sendiri terdapat bantuan dana desa dan bantuan dari kabupaten dengan pemberian sembako kepada masyarakat miskin yang disalurkan melalui desa, kemudian desa memilih melalui data

masyarakat miskin desa. Selain bantuan tersebut juga ada bantuan subsidi listrik, bantuan subsidi gaji, bantuan keringanan dalam pinjaman dan juga bantuan sembako.

Dilansir dari laman kompas.com pandemi yang berlangsung cukup lama diperkirakan melemahkan kapabilitas penduduk, menurunnya tingkat kesehatan dan terganggunya kelangsungan pendidikan akibat dari daya beli yang rendah. Bantuan sosial tunai digalakan namun pemerintah tidak terlalu terfokus dari adanya dampak bantuan sosial tunai yakni ketergantungan bagi penerimanya. Pemulihan daya ekonomi penduduk harus disertai dengan peningkatan kinerja ekonomi dalam menciptakan kesempatan kerja.

Berdasarkan pada subjek dalam penelitian ini mereka menaruh harapan besar pada bantuan agar tetap ada hingga waktu yang masih tidak terkira. Mereka beranggapan pada situasi seperti saat ini semuanya serba susah sehingga adanya bantuan ini sangat menolong untuk pemenuhan kebutuhan harian. Salah satu subjek dalam penelitian ini menjawab jika adanya keputusan sepihak penerimaan bantuan maka akan memperjuangkan agar mendapat bantuan kembali bagaimanapun caranya, nampak dari penjelasan tersebut adanya ketergantungan tinggi kepada bantuan yang rutin diberikan oleh Pemerintah. Berikut beberapa jawaban dari subjek terkait harapannya pada bantuan yang diberikan. Penjelasan ibu Sulkah Harapannya bantuan akan terus terlaksana karena untuk kebutuhan pokok, keluarga ibu sulkah bersandar pada BPNT dan juga untuk kebutuhan tambahan mengandalkan dana Triwulan. Karena pada saat ini suami Ibu Sulkah yang seorang kuli sudah jarang berkerja. Kemudian harapan ibu robiah Untuk bantuan sembako ibu robiah

berharap tidak adanya pemutusan untuk saat ini, karena pendapatannya yang minim tidak tercukupi jika tidak dibantu oleh PKH setiap bulannya. Selanjutnya harapan Ibu Susi pada bantuan ini lebih selektif agar tepat sasaran dan juga untuk bantuan tidak adanya kendala dalam pencairan karena dana bantuan sudah dinanti-nanti untuk mencukupi keperluan kedepan. Dan harapan ibu Anna seorang ibu yang memiliki anak balita berharap penuh bantuan ini terus berjalan untuk mencukupi kebutuhan susu anak dan juga guna tambahan dapur.

F. Fungsi Manifest PKH di Desa Sidorejo

Menurut (Merton 2014) Dalam kehidupan sosial dimasyarakat suatu fungsi dari lembaga dapat dilihat secara jelas yang termuat dalam tujuan dari lembaga tersebut yang diakui dan tertulis. Fungsi manifest disebut juga sebagai fungsi yang nyata, yang mana dalam fungsi tersebut memang direncanakan dan dibuat sebagai penyempurna dari suatu system. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sidorejo terdapat beberapa fungsi yang dibuat baik dari penyelenggara bantuan pusat yakni Kementerian Sosial.

Setiap tindakan memiliki konsekuensi-konsekuensi masing-masing baik yang disengaja maupun tidak disengaja sama halnya dengan fungsi dari suatu lembaga, selalu memiliki konsekuensi yang sengaja dibuat maupun konsekuensi yang tidak terantisipasi. Fungsi manifest dari perbudakan misalnya yang ada, menyebabkan tingkat produktivitas ekonomi meningkat di selatan (Ritzer 2012)

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sidorejo terdapat beberapa manfaat yang diterima secara nyata oleh penerima bantuan. Manfaat tersebut dibuat secara sengaja dan bertujuan guna membantu perekonomian keluarga pra-

sejahtera atau keluarga miskin penerimanya. Berdasarkan penjelasan dari ke-empat subjek penelitian yang sekaligus penerima bantuan mereka menuturkan beberapa manfaat yang diterima dari adanya bantuan program keluarga harapan yang akan dijabarkan dalam beberapa kategori. Yang pertama yakni fungsi manifest dalam bidang pendidikan dalam aspek pendidikan yang mana setiap anak keluarga penerima PKH mendapatkan KIP atau Kartu Indonesia Pintar yang setiap semesternya menyalurkan bantuan berupa uang tunai guna tambahan biaya pendidikan. Selain itu Pemilik KIP juga dibebaskan/diringankan dari biaya-biaya tambahan sekolah sehingga mengurangi beban tambahan orangtua. Kemudian yang kedua yakni fungsi manifest dalam kesehatan, Membantu dalam aspek kesehatan, dengan kepemilikan KIS atau kartu Indonesia sehat memberikan akses keluarga prasejahtera untuk dapat memeriksakan rutin kesehatan setiap anggota keluarga tanpa biaya tambahan yang harus difikirkan. Kemudian yang ketiga yakni fungsi manifest dalam bidang pendanaan triwulan Dalam aspek keseharian dana triwulan yang dicairkan setiap bulan Januari, April, Juli, Oktober dapat membantu keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya yakni fungsi manifest dalam pemberian sembako Keluarga penerima bantuan juga merasa tertolong dengan adanya program BNPT yang penyalurannya setiap bulan senilai Rp. 200.000 yang dipergunakan untuk memberi kebutuhan dapur melalui agen-agen yang ditunjuk. Dan yang terakhir yakni bidang kesejahteraan sosial Aspek kesejahteraan sosial juga dirasakan manfaatnya oleh lansia penerima bantuan program keluarga harapan. Di desa sidorejo

sering diadakan penyuluhan guna membina penduduk lanjut usia baik dari kegiatan senam lansia hingga penyuluhan terkait aspek kesehatan untuk lansia dan juga disabilitas.

G. Fungsi Laten PKH di Desa Sidorejo

Menurut Merton dalam Horten dan Hunt (1984:255) Fungsi laten diartikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang tidak terantisipasi atau tidak diramalkan. Fungsi ini sering disebut fungsi yang tidak dikehendaki. Fungsi manifest cenderung meruntuhkan atau merintang dari apa yang ingin dicapai dari fungsi manifest. (Ritzer 2012) Analisis sosiologis diperlukan guna menyingkap analisis-analisis tidak disengaja yang merupakan konsekuensi dari suatu system yang ada.

Fungsi laten dijelaskan oleh Merton bahwa tidak selalu membawa hal negative atau berlawanan dengan fungsi manifest. Fungsi laten diartikan suatu fungsi yang munculnya tanpa dikehendaki atau implisit namun berbeda dengan konsep disfungsi yang juga merupakan salah satu ide merton. Dalam pelaksanaan program keluarga harapan di desa Sidorejo juga terdapat beberapa konsekuensi-konsekuensi yang tidak diantisipasi dari kemunculannya. Berdasarkan hasil wawancara ke-empat subjek dan juga 2 subjek tambahan selaku petugas pelaksana program mendapatkan beberapa konsekuensi yang tidak diantisipasi dari pelaksanaan program bantuan, konsekuensi tersebut bukan hanya disfungsi laten namun juga fungsi yang bermanfaat dan bernilai namun dalam kemunculannya yang tidak disengaja atau tidak direncanakan oleh lembaga tersebut, berikut merupakan fungsi laten pertama yang ditemui oleh peneliti yakni dari informasi Bapak Angga selaku pengurus PKH dan juga informasi dari subjek penerima bantuan yakni terkait munculnya

agen-agen penyalur sembako yang “nakal” dalam konteks ini banyaknya agen yang memanfaatkan penerima bantuan guna mendapat keuntungan pribadi. Ditemui banyak agen yang menggesek kartu atm penerima bantuan secara sepihak dan mengatakan tidak ada saldo namun pada realitanya saldo tsb telah dipotong oleh agen tsb. Kurangnya edukasi yang diberikan kepada lembaga penyalur menyebabkan hal demikian sering terjadi. Penerima bantuan yang minim pengetahuan dimanfaatkan guna memperoleh keuntungan. Pihak desa Sidorejo tidak bisa memutus kerjasama secara sepihak kepada agen tersebut tanpa persetujuan pusat. Sehingga pengantisipasi dari kecurangan ini yakni dengan mengedukasi penerima bantuan agar lebih cermat dalam menyikapi jika ada agen nakal seperti ini. Fungsi laten yang kedua yakni pada aspek tingginya ketergantungan penerima bantuan terhadap bantuan yang diberikan. Pra-syarat PKH yang terlampau mudah memberikan ruang masyarakat pra sejahtera seluas-luasnya untuk mengakses bantuan tersebut. Terlebih lagi PKH merupakan bantuan yang dapat dikatan “*all in one access*” satu bantuan yang dapat memberikan banyak manfaat baik dalam pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Dengan banyaknya bantuan yang diberikan ini membuat masyarakat penerimanya menggantungkan diri pada bantuan tersebut. Dilansir dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti banyak masyarakat yang enggan jika bantuan tersebut diputus atau diberhentikan oleh pemerintah, subjek mengatakan akan memperjuangkan bantuan tersebut secara penuh karena merupakan topangan keluarga dalam mencukupi baik kebutuhan pangan bulanan maupun kebutuhan sekolah. Ketergantungan inilah konsekuensi yang

muncul dan tidak dapat diantisipasi oleh pemerintah. Pemberian bantuan dengan pra-syarat mudah memang membantuy masyarakat dalam jangka dekat, namun bukan dalam jangka panjang. Fungsi laten ketiga yang peneliti temui yakni banyaknya masyarakat yang mengaku miskin demi mengakses bantuan. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pak Angga selaku pengurus PKH desa Sidorejo, beliau banyak menemui masyarakat dengan ekonomi tergolong mampu (dilihat dari bentuk rumah dan juga kepemilikan kendaraan bermotor) namun memaksa untuk dapat mengakses bantuan. Perilaku ini memang bukan hanya ditemui di Desa Sidorejo saja namun banyak didaerah lainnya. Adanya kecemburuan pada masyarakat yang merasa bahwa bantuan harus didapatkan sama rata membuat banyak masyarakat yang mengaku miskin. Hal ini tentu merupakan konsekuensi negative dari adanya pemanfaatan bantuan, namun Desa selaku fasilitator tidak dapat memutuskan penerimaan bantuan kepada masyarakat yang tergolong mampu tersebut. Sehingga hal tersebut terus langgeng terjadi hingga adanya kesadaran dari individu masing-masing. Desa hanya memberi gambaran bahwa bantuan tersebut hanya diakses warga miskin dengan beberapa kriteria. Berdasarkan informasi subjek juga dituturkan bahwa ada tetangganya dengan kepemilikan banyak tanah dan memiliki pertamini namun menerima bantuan PKH. Hal ini sangat disayangkan karena bertabrakan dengan tujuan awal program. Fungsi laten keempat dalam pemanfaatan dana PKH yakni pada penerimanya. Banyak ditemui penerima yang “nakal” berkerjasama dengan agen guna dapat mengambil bantuan bukan seperti jalurnya seperti digunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan lain yang

tidak dicover oleh PKH. Penerima yang kurang teredukasi dan minimnya juga pengawasan dari pendamping membuat penyalahgunaan dana bantuan tunai maupun bantuan triwulan disalahgunakan. Telah dijelaskan bahwa bantuan dana yang cair tiga bulan sekali hanya dapat dimanfaatkan untuk tambahan biaya pendidikan, maupun transportasi kesehatan atau digunakan untuk tambahan kesejahteraan sosial namun dalam realitanya masih banyak penggunaan dana untuk dibelikan kebutuhan barang elektronik hingga perhiasan. Selain penerima yang kurang teredukasi dan pendamping yang kurang mengawasi, konsekuensi ini juga timbul akibat kurang tepatnya sasaran penerimaan sehingga evaluasi rutin harus dilaksanakan petugas agar meminimalisir penyalahgunaan dana bantuan yang diberikan. Fungsi laten kelima yakni munculnya solidaritas antar penerima bantuan program keluarga harapan. Dengan pertemuan rutin bulanan dalam agenda pemberian informasi/update terkait bantuan PKH membuat penerima bantuan saling bersosialisasi secara rutin sehingga memunculkan solidaritas antar anggota. Dikatakan oleh salah satu subjek yang juga merupakan penerima bantuan bahwa bukan hanya sekedar pertemuan rutin bulanan namun penerima bantuan PKH juga sering melakukan kumpul informal hanya untuk makan-makan bersama atau bercengkrama dengan intensitas waktu seminggu sekali. Kegiatan ini membuat solidaritas antar anggota muncul. Selain itu penerima bantuan saling tolong menolong dalam hal info bantuan. Banyak penerima PKH yang masih belum memiliki smartphone sehingga tetangga terdekatlah yang memberikan info, hal ini membentuk komunikasi yang intens dan memunculkan rasa empati antar penerima

Penutup

Berdasarkan temuan data dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa simpulan terkait penelitian ini. Penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Sidorejo mayoritas telat tepat sasaran yakni kepada keluarga pra-sejahtera dengan kepemilikan anak sekolah atau penduduk lanjut usia/ penyandang disabilitas berat. Dusun madubronto merupakan dusun dengan tingkat angka kemiskinan yang tinggi sehingga tinggi juga angka penerima bantuan program keluarga harapan di dusun tersebut. Penerima bantuan mayoritas merupakan penduduk yang telah menjualkan tanah sawah mereka kepada developer perumahan sehingga kehilangan mata pencaharian sehari-hari.

Dalam memanfaatkan dana bantuan, penerima bantuan mendapatkan bimbingan baik dari desa maupun pendamping kelurahan. Namun dengan masa pandemic seperti saat ini yang sangat minim pertemuan rutin bulanan membuat banyak muncul permasalahan yang timbul akibat miss informasi yang diberikan dan juga kurangnya tatap muka guna pembahasan terkait bantuan. Banyak juga ditemui pihak yang menyalahgunakan bantuan tidak semestinya, bukan hanya penerima bantuan namun juga penyalur bantuan dalam hal ini yakni agen yang ditunjuk selaku penyalur pangan non tunai.

Banyak ditemui penyalahgunaan yang masih tidak semestinya didalam pelaksanaan pemanfaatan bantuan Program Keluarga Harapan seperti pembelian bahan pokok dan penggunaan dana triwulan untuk membeli kebutuhan tersier seperti handphone hingga perhiasan. Permasalahan ini ditemui juga karena tidak ada pertanggungjawaban setelah penerima bantuan mencairkan dana bantuan. Permasalahan lainnya yakni pada agen

yang memanfaatkan minimnya pengetahuan penerima bantuan untuk keuntungan sepihak. Agen sering memanfaatkan hal tersebut dengan memanipulasi atm penerima bantuan.

Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini saran yang dapat diberikan oleh peneliti:

- a. Bagi masyarakat penerima bantuan, harus lebih rutin dan aktif dalam mengikuti setiap kegiatan yang diberikan oleh petugas pelaksana bantuan karena dalam setiap agenda memiliki tujuan yang berfungsi baik untuk pelaksanaan pemberian bantuan. Selain itu peneliti juga menyarankan agar penerima bantuan lebih cermat dan selektif dalam memanfaatkan dana bantuan.
- b. Bagi petugas pelaksana Program Keluarga Harapan, peneliti berharap adanya pendekatan lebih kepada setiap keluarga penerima manfaat agar lebih mengerti kondisi keluarga dan juga memahami dari segala aspek. Selain itu juga penegasan terkait pemanfaatan dana bantuan harus diberlakukan agar meminimalisir pemanfaatan bantuan yang tidak semestinya.
- c. Bagi agen penyalur bantuan, sebuah amanah jika disia-siakan hanyalah merugi belaka. Dalam setiap amanah memiliki beban kewajiban yang harus dilaksanakan. Agen telah ditunjuk sebagai penyalur dana bantuan diharapkan lebih kooperatif dan mengikuti arahan dari petugas pemberi bantuan dan menciptakan sosialisasi yang baik kepada penerima bantuan dan pemberi bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, A.D., 2015. MODAL SOSIAL DAN KEMISKINAN. *Sosio Informa*, 1(3), pp.310–323. Available at:

- <https://media.neliti.com/media/publications/52804-ID-modal-sosial-dan-kemiskinan.pdf>.
- Badan Pusat Statistik, 2019. Katalog Statistik BPS. *Statistik Penduduk Lanjut Usia di Indonesia 2019*, p.xxvi + 258 halaman.
- Chambers, R., 2006. What is poverty? Concepts and Measures. *Poverty in Focus*, (December 2006), pp.1–24.
- Creswell, J.W., 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Yog: Pustaka Pelajar.
- Effendi, M.S.R.& S., 1987. *Metode Penelitian Survey*, Yogyakarta: LP3ES.
- Jones, P., Bradbury, L. & Boutillier, S. Le, 2016. *Pengantar Teori-Teori Sosial*, Kementerian Sosial, 2020. Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. , pp.1–50.
- Merton, R.K., 2014. Social structure and anomie. In *Understanding Deviance: Connecting Classical and Contemporary Perspectives*. pp. 49–54.
- Putri Anita Rahman, Firman, R., 2019. KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF ILMU SOSIOLOGI. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 3, p.7. Available at: http://www.ghbook.ir/index.php?name=های رسانه و فرهنگ&option=com_dbook&task=readonline&book_id=13650&page=73&chhashk=ED9C9491B4&Itemid=218&lang=fa&tmpl=component%0Ahttp://www.albayan.ae%0Ahttps://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&q=APLIKASI+PENGENA.
- Ramadhani, P.E. & Mulyana, N., 2020. PERAN PENDAMPING DALAM PENGEMBANGAN USAHA KELOMPOK BINAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) (Di Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), p.64.
- Ritzer, G., 2012. *Teori Sosiologi; Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, Terjemahan: Saut Pasaribu, Rh*,
- Siahaan, H., 2011. Profil Kemiskinan di Surabaya: Sebuah Analisis Fenomenologis. *Tahun*, 24(031), pp.219–227. Available at: http://journal.unair.ac.id/filerPDF/05hotman siahaan_Profil Kemiskinan di Surabaya _tyas_.pdf.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Wirawan, I., 2013. Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma. *Jakarta, Kencana Prenada media Grup*.